



COVID-19 DAN RESPON KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP UMKM DI LIMA NEGARA KAWASAN ASIA TENGGARA

Alfin Yudistira

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dioni Andilaw Jesasta

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Alamat Korespondensi: alfinyudistira@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[02 12 2022]

Dinyatakan Diterima
[10 12 2022]

KATA KUNCI:

COVID-19, MSMEs, Policy Responses, Southeast Asian; Economy Recovery

KLASIFIKASI JEL:

E5, H3

ABSTRACT

Various policies have been taken by leaders in various parts of the world as a response to the shaking of the economy as a result of the outbreak of the COVID-19 outbreak. Problems that arise in the economy have an impact on various business actors, especially MSMEs. With a total of approximately 71 million, MSMEs are the backbone of the economy in Southeast Asia. Using qualitative research methods through content analysis techniques and literature studies, this study aims to find out the policy responses most widely taken by governments in five Southeast Asian countries, namely Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Vietnam. The results of the study show that the policies most frequently adopted by these countries include wage subsidy schemes, deferral tax payments, providing direct loans to MSMEs, and training and redeployment. Policies taken by the governments of Indonesia, Malaysia, Thailand and Singapore are more diversified than those of the Vietnamese government. As an entity that has liquidity vulnerabilities and limited access to funding, MSMEs need intensive support from the government as an effort to recover the economy.

ABSTRAK

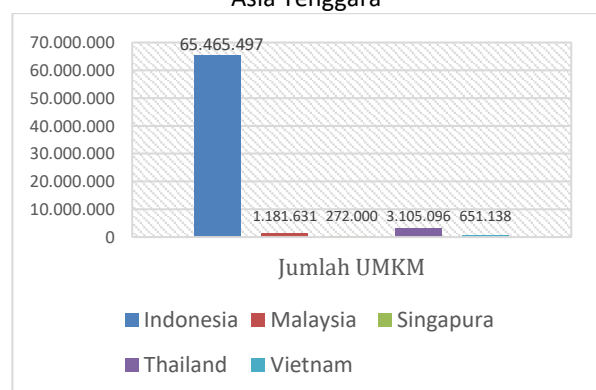
Berbagai kebijakan diambil oleh para pemimpin di berbagai belahan dunia sebagai respon atas terguncangnya perekonomian sebagai akibat dari merebaknya wabah COVID-19. Permasalahan yang timbul dalam perekonomian berdampak pada berbagai pelaku usaha terutama UMKM. Dengan jumlah kurang lebih 71 juta, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian di Asia Tenggara. Dengan metode penelitian kualitatif melalui teknik analisis isi dan studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon kebijakan yang paling banyak diambil oleh pemerintah di lima negara kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang paling banyak diambil oleh negara-negara tersebut meliputi skema subsidi upah, penundaan pembayaran perpajakan, pemberian pinjaman langsung kepada UMKM, dan training dan redeployment. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura lebih terdiversifikasi dibandingkan dengan pemerintah Vietnam. Sebagai entitas yang memiliki kerentanan likuiditas dan keterbatasan pada akses pendanaan, UMKM perlu dukungan secara intensif oleh pemerintah sebagai upaya pemulihan perekonomian.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 5 Januari 2020 WHO (World Health Organization) pertama kali merilis berita mengenai kejadian pneumonia di China yang belum diketahui penyebabnya. Saat ini telah dikenal sebagai COVID-19. Data WHO (2020) menyebutkan per 1 November 2022 telah terjadi akumulasi kasus COVID-19 secara global sebanyak 629.370.889 kasus. Berbagai cara dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran virus tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian Djalante *et al.*, (2020), negara-negara di kawasan Asia Tenggara merespon COVID-19 dengan beberapa kebijakan seperti penutupan perbatasan, pembatasan perjalanan, hingga *lockdown*. Covid-19 tidak hanya sekadar masalah kesehatan, namun berdampak bagi perekonomian negara, terutama bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) atau SME (*Small and Medium-Sized Enterprises*). Dalam beberapa bulan sejak pandemi COVID-19 mewabah, studi yang dilakukan oleh Takeda *et al.*, (2022) terhadap delapan negara berkembang di bagian selatan, tenggara, dan timur laut Asia menggambarkan bahwa UMKM mengalami penurunan pendapatan dan pengurangan tenaga kerja. Di awal merebaknya pandemi, OECD (The Organization for Economic Cooperation and Development) juga melakukan pemetaan terkait respon kebijakan pemerintah untuk memitigasi dampaknya terhadap UMKM dan kewirausahaan beberapa negara di dunia melalui survei pada rentang waktu Februari 2020 sampai dengan Februari 2021 termasuk lima negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. OECD juga berpendapat bahwa UMKM dan *start-ups* merupakan sektor yang paling rentan ketika krisis mengancam suatu negara.

Gambar 1. Jumlah UMKM di Lima Negara Kawasan Asia Tenggara



Sumber : ADB (2021) dan SMECorp (2022)

Berdasarkan data ADB (Asian Development Bank) tercatat pada tahun 2020 terdapat setidaknya sebanyak 71 juta UMKM di kawasan Asia Tenggara. Terdiri dari berbagai sektor seperti *wholesale* dan *retail*, konstruksi, manufaktur, transportasi, komunikasi, agrikultur, dan sektor lain. Data tahun 2019 yang ditunjukkan dalam Gambar.1 menunjukkan

bahwa Indonesia memiliki jumlah UMKM terbesar yaitu sekitar 65 juta dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM 63 juta diantaranya adalah usaha mikro.

Thailand, yang merupakan negara kedua terkonfirmasi COVID-19, mengandalkan industri pariwisatanya yang menyumbang sekitar 15 persen pada PDB (Produk Domestik Bruto) mengalami penurunan okupansi hotel karena 80 persen diantaranya terpaksa tutup sementara (Pongtanalert & Assarut, 2022). Di Indonesia, UMKM menyumbang sekitar 60 persen pada PDB nasional (Kemenkopukm, 2020). Makanan, minuman, industri kreatif, dan pertanian adalah bidang usaha UMKM yang paling terdampak pandemi di Indonesia (Thaha, 2020). Berdasarkan penelitian (Tien, 2022), sampai dengan akhir 2020 tercatat sebanyak 5,6 juta pekerja pada UMKM di Vietnam berkontribusi sekitar 45 persen pada PDB terdampak pandemi. UMKM di Vietnam didominasi pada sektor *wholesale* dan *retail* (ADB, 2021). Di Malaysia, 98,5 persen bisnis merupakan UMKM (Loh & Teoh, 2021). Berdasarkan data dari Departemen Statistik Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura di tahun 2020 terhadap statistik sektor jasa, UMKM berkontribusi besar pada sektor akomodasi, makanan, dan minuman.

UMKM di kawasan Asia Tenggara mencakup 90 persen dari total bisnis, di mana keberadaanya berpengaruh secara substansi terhadap PDB (Iqbal & Rahman, 2015). Namun, dengan likuiditas yang rendah serta terbatasnya pada akses kredit, dampak pandemi semakin dalam dirasakan. Pemerintah perlu bergerak cepat untuk memitigasi dampak tersebut dengan respon kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Studi yang dilakukan oleh Takeda *et al.*, (2022), menjelaskan bahwa UMKM cenderung membutuhkan bantuan terkait perpajakan seperti penundaan dan penurunan tarif, serta penundaan pembayaran pinjaman. UMKM merupakan kunci dalam melakukan pemulihan perekonomian. Studi yang dilakukan oleh Cirera *et al.*, (2021) menyebutkan bahwa negara berkembang menghadapi kesulitan untuk mendesain serta mengimplementasikan kebijakan karena kurangnya data. Apabila setiap negara bertindak sendiri maka akan sulit untuk menanggulangi masalah yang ada, oleh karena itu perlu berbagi informasi dan sumberdaya (Rampal *et al.*, 2020). Dengan merujuk pada hasil survei OECD terkait respon kebijakan pemerintah terhadap UMKM pada masa pandemi COVID-19, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dengan menjawab pertanyaan mengenai kebijakan apa yang paling banyak diambil oleh pemerintah di lima negara kawasan Asia Tenggara terhadap UMKM di masa pandemi COVID-19?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon kebijakan apa yang paling banyak diambil oleh pemerintah di lima negara kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam yang diambil sebagai langkah mitigasi atas

dampak pandemi COVID-19 pada UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pemimpin di negara-negara ASEAN (Association of Southeast Asia Nations) memberikan respon kebijakan UMKM saat pandemi COVID-19 sehingga memberikan alternatif kebijakan di masa depan.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian peralatan yang tidak hanya mencakup perundang-undangan, kebijakan publik juga mencakup aspek struktur pelaksana dan penganggaran (Anggara, 2014). Implementasi suatu kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan suatu kebijakan, di mana kebijakan tersebut ditujukan kepada suatu kelompok sasaran untuk mewujudkan tujuan kebijakan (Handoyo, 2012). Kebijakan publik hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain sebagai aktor kebijakan publik karena memiliki 3 kewenangan menurut Thomas R. Dye (Suwitri, 2008). Ketiga kewenangan tersebut diantaranya adalah hanya pemerintah yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik, hanya pemerintah yang memiliki legitimasi dan pengesahan kebijakan publik untuk sasaran suatu grup, dan hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada *targeted group*. Dalam penelitian Anggraeni *et al.*, (2021), untuk mendukung kebijakan pemerintah pada UMKM perlu dilakukan strategi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti digitalisasi, sosialisasi, penyederhanaan proses administrasi, dan perubahan strategi bisnis. Dengan adanya kewenangan yang luas oleh pemerintah maka diharapkan pemulihan ekonomi nasional dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan moneter, kebijakan fiskal, serta kebijakan lain yang dilaksanakan sebagai upaya membantu UMKM dengan langkah-langkah kebijakan serta tujuannya seperti yang telah dipetakan oleh OECD.

2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Klasifikasi UMKM di negara-negara kawasan Asia Tenggara memiliki perbedaan baik dalam lingkup jumlah pekerja maupun kriteria lainnya (ASEAN, 2021). Berikut merupakan klasifikasi UMKM berdasarkan masing-masing negara. Di Indonesia, kriteria UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan klasifikasi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. Atas perhitungan kekayaan bersih / modal yang ditunjukkan pada Tabel 1 tidak termasuk atas aset tanah dan aset berupa bangunan tempat untuk usaha.

Tabel 1. Klasifikasi UMKM Indonesia

Sektor	Mikro		Kecil		Menengah	
	Jumlah pegawai	Kriteria lain	Jumlah pegawai	Kriteria lain	Jumlah pegawai	Kriteria lain
-	1-4	Modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar Rupiah	5-19	Modal usaha lebih dari 1 miliar sampai dengan paling banyak 5 miliar Rupiah	20-99	Modal usaha lebih dari 5 miliar sampai dengan paling banyak 10 miliar Rupiah
		Penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 miliar Rupiah		Penjualan tahunan lebih dari 2 miliar sampai dengan paling banyak 15 miliar Rupiah		Penjualan tahunan lebih dari 15 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar Rupiah

Sumber : ASEAN (2021) dan BPS (n.d.)

Definisi terkait dengan UMKM di Malaysia terakhir disahkan berdasarkan pertemuan ke 14 NSDC (National SME Development Council) pada Juli 2013 lalu (Smeloanmalaysia, n.d.). Definisi tersebut menghasilkan klasifikasi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. Dalam panduan definisi UMKM yang diterbitkan oleh SME Corp Malaysia, selain kualifikasi kriteria, sebuah bisnis dapat dikategorikan sebagai UMKM apabila memenuhi dua syarat lagi yaitu syarat tipe pembentukan dan struktur kepemilikan.

Tabel 2. Klasifikasi UMKM Malaysia

Sektor	Mikro		Kecil		Menengah	
	Jumlah pegawai	Kriteria lain	Jumlah pegawai	Kriteria lain	Jumlah pegawai	Kriteria lain
Manufaktur	1-4	Omzet < 300 ribu Ringgit	5-74	Omzet 300 ribu - 15 juta Ringgit	75-200	Omzet 15 juta - 50 juta Ringgit
Jasa dan lainnya	1-4	Omzet < 300 ribu Ringgit	5-29	Omzet 300 ribu - 3 juta Ringgit	30-75	Omzet 3 juta - 20 juta Ringgit

Sumber : ASEAN (2021) dan SMECorp (n.d.)

Klasifikasi UMKM direviu oleh SPRING (Singapore's Standards, Productivity and Innovation Board) yang merupakan organisasi di bawah naungan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura Harun *et al.*, (2018). Untuk dapat diklasifikasikan sebagai UMKM, perlu memenuhi kriteria minimum kepemilikan 30 persen oleh pemilik modal lokal (ERIA, 2019). Selain kriteria kepemilikan, terdapat kriteria lain yang harus dipenuhi sesuai dengan data pada Tabel 3.

Tabel 3. Klasifikasi UMKM Singapura

Sektor	Mikro		Kecil		Menengah	
	Jumlah pegawai	Kriteria lain	Jumlah pegawai	Kriteria lain	Jumlah pegawai	Kriteria lain
-	≤ 200	Omzet ≤ 100 juta Dolar Singapura	≤ 200	Omzet ≤ 100 juta Dolar Singapura	≤ 200	Omzet ≤ 100 juta Dolar Singapura

Sumber : ASEAN (2021)

Berdasarkan *Ministerial Regulations on the Designation of The Characteristic of Small and Medium Enterprises Promotion Act* B.E. 2562 (2019), definisi UMKM di Thailand menggunakan kriteria pendapatan

tahunan dan jumlah pekerja seperti yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Klasifikasi UMKM Thailand

Sektor	Mikro		Kecil		Menengah	
	Jumlah pegawai	Kriteria lain	Jumlah pegawai	Kriteria lain	Jumlah pegawai	Kriteria lain
Manufaktur	≤ 5	Pendapatan tahunan ≤ 1, 8 juta Baht	≤ 50	Pendapatan tahunan ≤ 100 juta Baht	≤ 200	Pendapatan tahunan ≤ 500 juta Baht
Dagang dan jasa	≤ 5	Pendapatan tahunan ≤ 1, 8 juta Baht	≤ 30	Pendapatan tahunan ≤ 50 juta Baht	≤ 100	Pendapatan tahunan ≤ 300 juta Baht

Sumber : ASEAN (2021)

Definisi terbaru terkait dengan UMKM di Vietnam terakhir diubah pada tahun 2018 (ERIA, 2019). Berdasarkan keputusan pemerintah nomor 39/2018/ND-CP mendefinisikan UMKM dengan kriteria sebagaimana ditunjukkan pada Tabel.5.

Tabel 5. Klasifikasi UMKM Vietnam

Sektor	Mikro		Kecil		Menengah	
	Jumlah pegawai	Kriteria lain	Jumlah pegawai	Kriteria lain	Jumlah pegawai	Kriteria lain
Agrikultur, kehutanan, perikanan, industri, dan konstruksi	1-10	Total pendapatan < 3 miliar Dong	11-100	Total pendapatan 3-50 miliar Dong	101-200	Total pendapatan 50-300 miliar Dong
		Total Modal < 3 miliar Dong		Total Modal 3-20 miliar Dong		Total Modal 20-100 miliar Dong
Dagang dan jasa	1-10	Total pendapatan < 10 miliar Dong	11-50	Total pendapatan 10-100 miliar Dong	51-100	Total pendapatan 100-300 miliar Dong
		Total Modal < 3 miliar Dong		Total Modal 3-50 miliar Dong		Total Modal 50-100 miliar Dong

Sumber : ASEAN (2021)

2.3 Klasifikasi Kebijakan Oleh OECD

Berdasarkan hasil survei OECD (2021) terhadap beberapa negara di dunia dalam rentang waktu Februari 2020 sampai dengan Februari 2021 termasuk lima negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dilakukan klasifikasi atas tipe respon kebijakan terhadap UMKM. Tipe kebijakan tersebut diklasifikasikan berdasarkan tujuannya menjadi 2 yaitu *liquidity concern* (dukungan likuiditas) dan *structural support* (dukungan struktural). Atas 2 tipe kebijakan tersebut kemudian dirinci dan dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Tipe kebijakan dukungan likuiditas dapat dijabarkan menjadi 3 kategori sebagai berikut :

1. *job retention schemes* (skema retensi pekerjaan) dimana didalamnya terdapat beberapa kebijakan seperti *partial redundancies*, *short-time work* (waktu bekerja yang lebih pendek), dan *wage subsidy schemes* (skema subsidi upah). Kebijakan ini ditujukan bagi *self-employed* atau pekerja yang tidak bekerja pada perusahaan tertentu yang memberikan pendapatan konstan dan tujuan korporasi. Kebijakan ini berfokus untuk meningkatkan permintaan konsumen dan untuk mencegah anjloknya tingkat kehilangan pekerjaan.

Tipe kebijakan ini dimasukkan ke dalam kategori *labour-related schemes*.

2. *deferral of payment* (penundaan pembayaran) adalah kebijakan yang berhubungan dengan penundaan dan penurunan *rate* perpajakan seperti *income tax* (pajak penghasilan orang pribadi), *corporate tax* (pajak badan), dan *value added tax* (pajak pertambahan nilai). Selain itu kebijakan ini juga berhubungan dengan *social security and pension* (pensiun dan jaminan sosial), *rent/utilities* (sewa/tagihan lainnya), dan pengurangan lainnya terkait pembayaran dan tingkat bunga, serta *debt moratorium* (penundaan pembayaran utang). Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi biaya operasional sehingga dapat menjaga tingkat likuiditas. Tipe kebijakan dimasukkan ke dalam kategori *deferral measures*.
3. *Financial support* (dukungan keuangan/pendanaan) adalah kebijakan yang diberikan melalui pemberian utang dengan *loan guarantee* (pemberian pinjaman), *direct lending to SMEs* (*Small and Medium-Sized Enterprises*) atau pemberian pinjaman langsung yang khusus untuk UMKM melalui institusi keuangan sektor publik, *grant and subsidies* (bantuan dan hibah), dan *equity instrument*. Tipe kebijakan ini dimaksudkan untuk mempertahankan/memperbaiki tingkat likuiditas UMKM. Tipe kebijakan ini dimasukkan ke dalam kategori *financial instruments*.

Kategori kebijakan keempat adalah *structural support* (dukungan struktural). Kebijakan ini bertujuan untuk membuat UMKM menjadi adaptif dan tangguh di tengah perubahan lingkungan akibat pandemi COVID-19. Kebijakan ini terdiri dari beberapa sub kategori diantaranya adalah *new market* sebagai langkah untuk memitigasi penurunan penawaran konsumen dengan mencari pasar alternatif, peningkatan kemampuan digital dan akses infrastruktur digital dengan mengadopsi *teleworking* dan *digitalization*, peningkatan inovasi, peningkatan keahlian pemilik bisnis dan/atau pegawainya melalui *training* dan *redeployment*, dukungan terhadap *start-ups*, dan dukungan lain sebagai langkah untuk menjaga keberlanjutan usaha dan lingkungan atau *sustainability measures*. Tipe kebijakan dimasukkan ke dalam kategori *structural policies*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan teknik analisis isi dan studi pustaka. Analisis isi menggali suatu teks dengan objektif sehingga memberikan gambaran apa adanya (Ahmad, 2018). Objek dalam penelitian ini adalah respon kebijakan pemerintah di lima kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN pada UMKM di masa pandemi COVID-19 pada Februari 2020 sampai dengan Februari 2021. Teknik analisis isi dilakukan atas data dan informasi yang berasal dari Laporan OECD (2021) "*An in-depth analysis of one year of SME and*

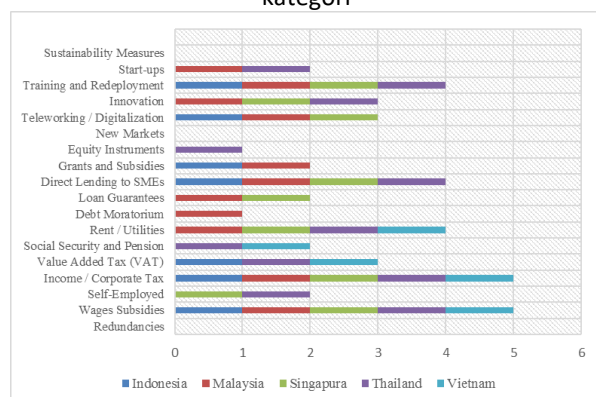
entrepreneurship policy responses to COVID-19: Lesson learned for the path to recovery” terkait respon kebijakan pemerintah terhadap UMKM pada masa pandemi COVID-19. Data dianalisis dan disajikan dalam pembahasan secara tematik berdasarkan klasifikasi instrumen kebijakan OECD yang paling banyak diambil pada setiap kategori sebagai respon kebijakan. Hasil pembahasan dilakukan pengayaan dari sumber lain seperti jurnal dan informasi lain yang relevan.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Respon Kebijakan Umum

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan OECD (2021), secara umum respon kebijakan pemerintah di masing-masing negara dilakukan secara diversifikasi kebijakan sesuai dengan yang ditunjukkan pada Gambar 2. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kategori *labour-related schemes*, kebijakan skema subsidi upah adalah kebijakan yang paling banyak diambil. Kebijakan tersebut diterapkan oleh kelima negara. Pada kategori *deferral measures*, kebijakan yang berhubungan dengan pajak penghasilan orang pribadi/badan adalah kebijakan yang paling banyak diambil. Kebijakan tersebut diterapkan oleh kelima negara. Pada kategori *financial instruments*, kebijakan pemberian pinjaman langsung yang khusus untuk UMKM melalui institusi keuangan sektor publik adalah kebijakan yang paling banyak diambil. Kebijakan tersebut diterapkan oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pada kategori terakhir yaitu *structural policies*, kebijakan *training* dan *redeployment* adalah kebijakan yang paling banyak diambil. Kebijakan tersebut diterapkan oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Untuk kebijakan *redundancies*, pencarian pasar alternatif, dan langkah keberlanjutan usaha dan lingkungan tidak diambil oleh kelima negara sebagai respon kebijakan.

Gambar 2. Respon Kebijakan Pemerintah Per Sub kategori



Sumber : Hasil olahan penulis (2022)

4.2 Respon Kebijakan Kategori *Labour-Related Schemes* Melalui Skema Subsidi Upah

Penelitian Djalante et al., (2020) menjelaskan bagaimana negara-negara di Asia Tenggara bereaksi atas penyebaran wabah COVID-19 yang dilakukan melalui pembatasan perjalanan wisata, lockdown, penutupan tempat-tempat publik, dan bentuk lainnya

memberikan batasan ruang gerak manusia. Pembatasan tersebut membuat UMKM sulit untuk melakukan business as usual. Permasalahan pada rantai pasok terjadi antarnegara. Tingkat pendapatan yang semakin rendah membuat UMKM kesulitan untuk membayar pekerjanya. Pada awal 2020 ketika wabah COVID-19 merebak, pengurangan jumlah pegawai setidaknya 30 persen terjadi di Indonesia, Malaysia, dan Vietnam Takeda et al., (2022). Sekitar 39 persen UMKM di Indonesia mengalami pengurangan jumlah pekerja tetapnya. Di Malaysia, pengurangan jumlah pekerja tetap lebih tinggi dibandingkan Indonesia yaitu sekitar 42%. Angka pengurangan tertinggi dibandingkan Indonesia dan Malaysia terjadi di Vietnam. Vietnam mengalami 64% pengurangan pekerja tetapnya. Untuk menanggulangi fenomena tersebut melakukan kebijakan-kebijakan terkait tenaga kerja, salah satunya adalah skema subsidi upah. Di Indonesia kebijakan ini pada awal 2020 dilaksanakan dengan pemberian subsidi upah sebanyak 600.000 Rupiah untuk 5,5 juta pekerja/buruh (DJPb, 2020). Di Malaysia, subsidi upah diberikan mulai dari 600 sampai dengan 1200 Ringgit untuk pekerja lokal yang memiliki pendapatan bulanan sampai dengan 4000 Ringgit. Untuk penerapan di Singapura, sebesar 1.000 Dolar Singapura diberikan kepada individu kriteria tertentu dan 300 Dolar Singapura untuk pekerja seperti pengemudi taksi (OECD, 2020). Pengimplementasian di Thailand dilakukan dengan memberikan subsidi upah sebesar 5000 Baht untuk 3 juta orang terdampak. Sedangkan Vietnam, menawarkan pinjaman dengan bunga 0 persen yang dapat digunakan untuk pembayaran upah pekerja bagi pemilik usaha. Dalam survei kebijakan OECD dijelaskan bahwa skema subsidi upah diambil untuk memberikan penanggulangan pemutusan hubungan kerja serta retensi atas pekerjaan. Secara akumulasi kebijakan yang paling banyak diambil oleh kelima negara pada kategori *labour-related schemes* adalah kebijakan subsidi upah.

4.3 Respon Kebijakan *Deferral Measures* Melalui Pajak Penghasilan Orang Pribadi / Badan

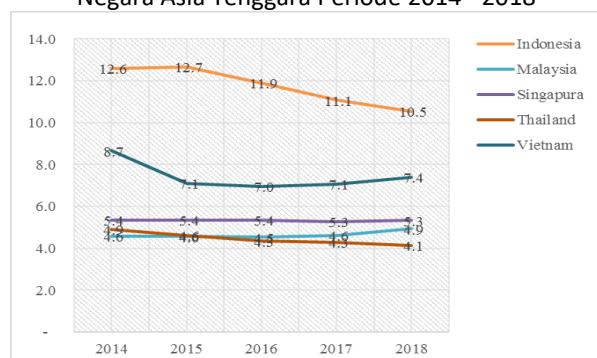
Langkah kebijakan perpajakan di negara kawasan Asia Tenggara dihimpun oleh OECD yang telah dipetakan dalam penelitian Arham & Firmansyah (2021) yang menjelaskan bahwa negara-negara tersebut merespon COVID-19 dengan kebijakan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan badan, pajak konsumsi lainnya, PPN (Pajak Pertambahan Nilai), pajak properti, dan pajak lainnya. Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengambil langkah kebijakan pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan badan. Singapura dan Thailand mengambil kebijakan pajak penghasilan badan. Dalam respon kebijakan *deferral measures*, penundaan pembayaran social expenditure salah satunya penundaan pembayaran pajak. COVID-19 membawa dampak signifikan terutama bagi likuiditas UMKM (Kroeger et al., 2020). Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa selain likuiditas, pandemi berpengaruh secara substantif pada profitabilitas dan

solvabilitas. Dalam survei kebijakan OECD dijelaskan bahwa kebijakan penundaan pembayaran pajak diambil untuk mengurangi tekanan pada likuiditas UMKM yang rentan. Penundaan diaplikasikan secara bervariasi dalam rentang waktu di negara-negara tersebut. Pemerintah Indonesia memberikan insentif pajak kepada pelaku UMKM melalui insentif PPh (Pajak Penghasilan) final tarif 0.5 persen ditanggung pemerintah (Kemenkeu, 2021). Di Malaysia penundaan pembayaran pajak penghasilan diberi jangka waktu 3 bulan sejak April 2020. Di Singapura, relaksasi penundaan sekitar 2 bulan atas pembayaran yang jatuh tempo April 2020 menjadi Juni 2020. Penundaan pembayaran pajak penghasilan badan ke bulan Agustus dan September 2020 diumumkan oleh Pemerintah Thailand pada Maret 2020. Penundaan pembayaran pajak penghasilan di Vietnam diberikan sekitar 5 bulan dari tanggal jatuh tempo pembayaran seharusnya (LawNet, 2020). Secara akumulasi kebijakan yang paling banyak diambil oleh kelima negara pada kategori deferral measures adalah kebijakan terkait penundaan pada pembayaran pajak penghasilan orang pribadi/badan.

4.4 Respon Kebijakan *Financial Instruments* Melalui Pinjaman Langsung Kepada UMKM

UMKM memiliki peranan penting di Asia dengan menyumbang lapangan pekerjaan yang besar, namun memiliki kesulitan pada akses perbankan sebagai sistem keuangan yang mendominasi di Asia (Yoshino & Taghizadeh-Hesary, 2018). Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa UMKM cenderung mendapatkan pinjaman berjaminan dengan tingkat bunga yang tinggi karena kesulitan bank dalam menilai kinerja UMKM sebagai akibat keterbatasan dalam sistem pencatatan akuntansi pada pembukuan UMKM. Data tingkat suku bunga pinjaman perbankan (per tahun) disajikan pada Gambar.3.

Gambar 3. Tingkat Suku Bunga Pinjaman Bank di Lima Negara Asia Tenggara Periode 2014 - 2018



Sumber : ADB (2021)

Secara umum tingkat bunga pinjaman di Indonesia lebih tinggi dibandingkan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Rata-rata tingkat suku bunga di Indonesia periode 5 tahun tersebut adalah sebesar 11,8 persen. Vietnam berada di posisi setelahnya dengan rata-rata tingkat suku bunga sebesar 7,4 persen. Singapura berada di urutan ketiga dengan tingkat suku bunga rata-rata sebesar 5,5 persen. Untuk posisi selanjutnya masing-masing

ditempati oleh Thailand dan Malaysia dengan sedikit perbedaan masing-masing sebesar 4,6 persen dan 4,5 persen.

Pemerintah Indonesia memberikan bantuan dengan penyaluran dana bergulir melalui LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) sebesar 2,6 triliun Rupiah kepada koperasi dan UMKM (LPDB, 2021). Melalui institusi keuangannya seperti Bank Sentral Malaysia, BSN (Bank Simpanan Nasional) menawarkan pinjaman dengan bunga rendah 3,5 persen serta skema pinjaman mikro kredit tanpa jaminan dengan tingkat bunga 0 persen. Untuk aplikasi kebijakan di Singapura, MAS (Monetary Authority of Singapore) bekerja sama dengan institusi keuangan dengan penyediaan suku bunga 0,1 persen untuk membantu bank dan perusahaan pembiayaan lain dalam memberikan pinjaman kepada UMKM (MAS, 2020). Bank of Thailand menawarkan pinjaman dengan plafon paling tinggi sebesar 500 juta Baht dan tingkat suku bunga sebesar 2 persen untuk 2 tahun. Fasilitas penawaran tersebut termasuk pengecualian pengenaan bunga pada masa 6 bulan pertama periode pinjaman. Secara akumulasi kebijakan yang paling banyak diambil oleh empat negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand pada kategori *financial instruments* adalah kebijakan *Direct lending to SMEs*.

4.5 Respon Kebijakan *Structural Policies* Melalui *Training and Redeployments*

Dengan adanya perubahan kondisi dan keterbatasan untuk menjalankan usaha, diperlukan percepatan untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha dan adopsi cara baru untuk dapat menjalankan usaha kembali. bahwa di tengah pandemi COVID-19 UMKM memerlukan bantuan restrukturisasi dan relaksasi untuk kredit, serta dukungan terhadap penyediaan pelatihan (Affandi *et al.*, 2020). Pekerja pada sektor informal mempunyai kecenderungan akses yang terbatas pada pelatihan (Fluitman, 1989; Lautier, 2000 dikutip dalam Park & Inocencio, 2020). Penyelenggaraan pelatihan bagi UMKM dilaksanakan untuk memperoleh keahlian baru maupun meningkatkan kompetensi yang telah dimiliki (OECD, 2020). Kebijakan *training* dan *redeployments* diterapkan di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bentuk implementasi kebijakan ini berbeda di setiap negara seperti di Indonesia dan Singapura yang menyediakan pelatihan dalam jaringan yang sekaligus memberikan bantuan uang tunai. Program Kartu Prakerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dilaksanakan dengan peserta sebanyak 4 juta UMKM (Islami *et al.*, 2021). Pemerintah Malaysia menganggarkan sebesar 50 juta Ringgit untuk kursus singkat yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan digital pekerja yang disediakan oleh HRDF (Human Resources Development Fund). *The Enhanced Training Support Package* dan *Enhanced Absentee Payroll* diluncurkan oleh Pemerintah Singapura dalam rangka memberikan pelatihan untuk sektor-sektor penting yang terdampak

pandemi COVID-19 seperti sektor konsumsi, retail, pariwisata, dan penerbangan (OECD, 2020). Implementasi di Thailand, dilakukan pelatihan oleh Ministry The Higher Education, Science, Research, and Innovation untuk 40.000 orang yang telah kehilangan pekerjaannya akibat terdampak pandemi. Secara akumulasi kebijakan yang paling banyak diambil oleh empat negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand pada kategori *structural policies* adalah kebijakan *training* dan *redeployment*.

Dengan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB di Asia Tenggara, UMKM mendapat perhatian pemerintah masing-masing negara karena menjadi salah satu sektor paling berdampak sebagai akibat krisis perekonomian sejak mewabahnya COVID-19. Dengan adanya pemetaan respon kebijakan pada 60 negara di dunia, dapat dijadikan referensi bagi negara-negara untuk mengambil langkah alternatif kebijakan pemulihan perekonomian melalui dukungan terhadap pelaku usaha UMKM. Tidak hanya berfokus pada langkah kebijakan fiskal dan moneter, pelatihan dan digitalisasi UMKM membawa dampak positif dalam sehingga UMKM dapat berkembang inovasi maupun keberlanjutan usahanya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

UMKM merupakan sektor yang paling rentan ketika krisis ekonomi mengancam sebagai akibat mewabahnya COVID-19. Kerentanan likuiditas dan terbatasnya akses pada pendanaan membuat dukungan pemerintah terhadap UMKM sangat berperan. Dengan ditetapkannya kebijakan publik kepada *targeted group* yaitu UMKM, pemerintah berupaya untuk memberikan bantuan sebagai salah satu langkah upaya perbaikan perekonomian. Sebagai tulang punggung perekonomian, diharapkan pemulihan perekonomian dapat tercapai melalui kebijakan yang tepat dalam mendukung UMKM melewati masa sulit. Melalui pemetaan respon kebijakan pemerintah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam oleh OECD dapat menjadi sumber referensi informasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan alternatif. Berdasarkan survei tersebut, kebijakan yang paling banyak diambil pada kategori *labour-related schemes* adalah skema subsidi upah. Pada kategori *deferral measures* kebijakan yang paling banyak diambil adalah penundaan pembayaran atas pajak penghasilan baik orang pribadi maupun pajak badan. Pada kategori financial instruments kebijakan yang paling banyak diambil adalah pinjaman langsung kepada UMKM. Untuk kategori terakhir yaitu *structural policies*, *training* dan *redeployment* merupakan kebijakan yang paling banyak diambil. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand terdiversifikasi dibandingkan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Vietnam.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah objek penelitian yang hanya terdiri dari lima negara di kawasan Asia Tenggara. Penelitian

selanjutnya dapat menambahkan objek penelitian seperti menambahkan negara di kawasan Asia Tenggara lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini. Untuk analisis pembahasan, penelitian ini menggunakan pemetaan respon kebijakan berdasarkan survei yang dilakukan oleh OECD. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan indikator kebijakan lainnya seperti kebijakan kepada UMKM yang dipetakan oleh World Bank.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- ADB. (2021). *2021 ADB Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor Volume 1: Country and Regional Reviews*. 2021 ADB Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor Volume 1: Country and Regional Reviews.
- Affandi, A., Sobarna, A., Erlangga, H., Siagian, A. O., Purwanto, A., Effendy, A. A., Sunarsi, D., Wicaksono, W., Ariyanti, E., & Manik, C. D. (2020). Optimization of MSMEs Empowerment in Facing Competition in the Global Market during the COVID-19 Pandemic Time. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(11), 10.
- Ahmad, J. (2018). *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*. 21.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*.
- Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., & Nurdiyah, N. (2021). Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 47–65.
- Arham, A., & Firmansyah S.E., M.M., M.Ak., Dr. A. (2021). Kebijakan Pajak Selama Pandemi Covid-19 Di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1258>.
- ASEAN. (2021). *Definitions of MSME in 10 ASEAN Member States*. <https://asean.org/wp-content/uploads/Definition-of-MSME-in-ASEAN-Member-States.pdf>.
- Badar Alam Iqbal & Mohd Nayyer Rahman. (2015). Contribution of ASEAN-6 SMEs to Economic Growth of ASEAN. *Economics World*, 3(6). <https://doi.org/10.17265/2328-7144/2015.1112.002>.
- BPS. (n.d.). *Sistem Informasi Rujukan Statistik—View Variabel*. Retrieved December 9, 2022, from <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/8720>.
- Cirera, X., Cruz, M., Davies, E., Grover, A., Iacovone, L., Cordova, J. E. L., Medvedev, D., Maduko, F. O., Nayyar, G., Ortega, S. R., & Torres, J. (2021). *Policies to Support Businesses through the COVID-19 Shock: A Firm Level Perspective*. 33.
- Djalante, R., Nurhidayah, L., Van Minh, H., Phuong, N. T. N., Mahendradhata, Y., Trias, A., Lassa, J., & Miller, M. A. (2020). COVID-19 and ASEAN responses: Comparative policy analysis.

- Progress in Disaster Science*, 8, 100129. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100129>.
- DJPb. (2020). *Dorong Pemulihan Dunia Usaha, Pemerintah Salurkan Subsidi Upah/Gaji dan Perpanjang Subsidi Bunga KUR*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/component/content/article/842-campaign-4/3400-dorong-pemulihan-dunia-usaha,-pemerintah-salurkan-subsidi-upah-gaji-dan-perpanjang-subsidi-bunga-kur.html?Itemid=776>.
- ERIA. (2019). *Study on MSMEs Participation in the Digital Economy in ASEAN: Nurturing ASEAN MSMEs to Embrace Digital Adoption*. <https://asean.org/storage/2012/05/Study-on-MSME-Participation-in-the-Digital-Economy-in-ASEAN.pdf>.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan publik*. Semarang: Widya Karya.
- Harun, H., Carter, D., Khan, H., & MacLennan, M. (2018). *The Institutional Environment for Small and Medium Enterprises (SMEs) and Roles for the Accounting Profession ASEAN PERSPECTIVES*.
- Islami, N. W., Supanto, F., & Soeroyo, A. (2021). *PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN UMKM YANG TERDAMPAK COVID-19*. 13.
- Kemenkeu. (2021). *Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak*. PPID Kementerian Keuangan. <https://e-ppid.kemenkeu.go.id/in/post/pemerintah-perpanjang-insentif-pajak>.
- Kemenkopukm. (2020). *SEKTOR UMKM JADI KUNCI PEMULIHAN EKONOMI DI TENGAH PANDEMI*. KEMENKOPUKM. <https://kemenkopukm.go.id/read/sektor-umkm-jadi-kunci-pemulihan-ekonomi-di-tengah-pandemi>.
- Kroeger, T., Nguyen, A. T. N., Zhang, Y. S., Minh, N. H., Thuy, P. D., & Tuan, D. D. (2020). *Corporate Vulnerabilities in Vietnam and Implications of COVID-19 by Thilo Kroeger, Anh Thi Ngoc Nguyen, Y. Sophia Zhang, Nguyen Huy Minh, Pham Dinh Thuy, Duong Danh Tuan: SSRN*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3772464.
- LawNet. (2020). *Decree No. 41/2020/ND-CP dated April 08, 2020 on tax and land rent deferral 41/2020/ND-CP, Nghị định 41 2020*. Decree No. 41/2020/ND-CP Dated April 08, 2020 on Tax and Land Rent Deferral - LawNet. <https://lawnet.vn/en/vb/Decree-41-2020-ND-CP-tax-and-land-rent-deferral-6B4F0.html>.
- Loh, C.-H., & Teoh, A.-P. (2021). *The Adoption of Big Data Analytics Among Manufacturing Small and Medium Enterprises During Covid-19 Crisis in Malaysia*. 95–100. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210507.01>.
- LPDB. (2021). *LPDB-KUMKM Bantu Koperasi Bertahan di Masa Pandemi | Lembaga Pengelola Dana Bergulir*. <https://www.lpdb.id/info-terbaru/news/lpdb-kumkm-bantu-koperasi-bertahan-di-masa-pandemi/>.
- MAS. (2020). *New Facility at interest rate of 0.1% to help banks and finance companies lower cost of loans to SMEs*. <https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2020/mas-sgd-facility-for-esg-loans>.
- OECD. (2020). *Enterprise Policy Responses to COVID-19 in ASEAN*. ASEAN.
- OECD. (2021). *An in-depth analysis of one year of SME and entrepreneurship policy responses to COVID-19: Lessons learned for the path to recovery*. OECD. <https://doi.org/10.1787/6407deee-en>.
- Park, C.-Y., & Inocencio, A. M. (2020). *COVID-19, Technology, and Polarizing Jobs*. *Asian Development Bank*.
- Pongtanalert, K., & Assarut, N. (2022). *Entrepreneur Mindset, Social Capital and Adaptive Capacity for Tourism SME Resilience and Transformation during the COVID-19 Pandemic*. *Sustainability*, 14(19), Article 19. <https://doi.org/10.3390/su141912675>.
- Rampal, L., Liew, B. S., Choolani, M., Ganasegeran, K., Pramanick, A., Vallibhakara, S. A., ... & Hoe, V. C. (2020). *Battling COVID-19 pandemic waves in six South-East Asian countries: A real-time consensus review*. 75(6).
- SMECorp. (n.d.). *SME Definitions*. Retrieved December 9, 2022, from <https://www.smeCorp.gov.my/index.php/en/policies/2020-02-11-08-01-24/sme-definition>.
- SMECorp, Smec. (2022). *Profile of MSMEs in 2016-2021*. <https://www.smeCorp.gov.my/index.php/en/policies/2020-02-11-08-01-24/profile-and-importance-to-the-economy#:~:text=Based%20on%20the%20latest%20data,of%20overall%20establishments%20in%20Malaysia>.
- Smeloanmalaysia. (n.d.). *Defining SMEs*. Retrieved December 9, 2022, from <https://www.smeloanmalaysia.com/defining-smes>.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep dasar kebijakan publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Takeda, A., Truong, H. T., & Sonobe, T. (2022). *The impacts of the COVID-19 pandemic on micro, small, and medium enterprises in Asia and their digitalization responses*. *Journal of Asian Economics*, 82, 101533. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101533>.
- Taha, A. F. (2020). *DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI INDONESIA*. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), Article 1.

-
- Tien, N. V. (2022). Recommendations Enhancing the Competitive Capacity of Small and Medium Enterprises after the Covid-19 Pandemic. *Emerging Science Journal*, 6, 122–135. <https://doi.org/10.28991/esj-2022-SPER-09>.
- WHO. (2020). *Pneumonia of unknown cause – China*. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2020-DON229>.
- Yoshino, N., & Taghizadeh-Hesary, F. (2018). *The Role of SMES in Asia and Their Difficulties in Accessing Finance*. <https://think-asia.org/handle/11540/9483>.